

Judul : Bentuk panja reformasi, Komisi III tampung aspirasi rakyat
Tanggal : Senin, 17 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bentuk Panja Reformasi Komisi III Tampung Aspirasi Rakyat

KOMISI III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Panja ini hadir untuk memastikan supremasi hukum ditegakkan, menciptakan penegakan hukum yang adil dan tidak bisa diperjualbelikan.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menegaskan, Panja ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kinerja polisi, jaksa, dan hakim secara langsung. Dengan begitu, DPR dapat mendengar secara nyata persoalan yang dihadapi publik dalam penegakan hukum.

"Selain wadah berkumpulnya aspirasi, Panja bisa mendorong penyelesaian masalah baik secara teknis maupun substansi kepada pemangku kepentingan terkait," ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

Lewat Panja ini, DPR akan mengevaluasi kinerja Polri, Kejaksaan, dan pengadilan agar penegakan hukum berjalan selaras. Hal ini penting karena belakangan terlihat ketiga lembaga cenderung bekerja masing-masing dan tidak beriringan. "Tidak terintegrasinya kinerja lembaga hukum jelas merugikan rakyat yang mencari keadilan atas hak-hak mereka sebagai warga negara," jelasnya.

Anggota Fraksi PKB itu berharap, supremasi hukum dapat ditegakkan dan keadilan tercipta bagi semua pihak. Karena Panja akan mengatur detail kerja, baik teknis maupun substansi, agar efektif menyerap aspirasi masyarakat. "Ini semua demi reformasi hukum yang menjadi misi Presiden Prabowo," tegasnya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menambahkan, pembentukan Panja itu dilakukan berdasarkan banyaknya masukan dari masyarakat atas tiga lembaga penegak hukum

itu. Pada Selasa (18/11/2025) pihaknya memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. "Selanjutnya akan dilakukan pengesahan Panja," kata Habib.

Menurutnya, kehadiran Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan merupakan jawaban DPR terhadap desakan publik yang menginginkan pembaruan dari lembaga penegak hukum. Agar penegakan hukum semakin baik dan semakin berkeadilan.

Panja itu nantinya bertugas untuk menerima laporan masyarakat tentang kasus pelanggaran hukum yang ditengarai terjadi di lembaga Polri, Kejaksaan maupun pengadilan. "Kami akan secara khusus menerima aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di tiga institusi tersebut," ucapnya.

Menyikapi pembentukan Panja tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Anang Supriatna mengatakan, belum mendapat kabar resmi dari Senayan. Dia bilang, pihaknya terus melakukan pembenahan di internal. "Terbukti dengan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap capaian kinerja kejaksaan selama 5 tahun berturut-turut dari hasil survei," ucapnya.

Kendati demikian, Anang menyebut Kejaksaan terbuka dengan setiap kritik dan masukan. Kejaksaan berkomitmen untuk bertransformasi menjadi lebih baik dalam mengedepankan tindakan-tindakan hukum yang tegas, adil, transparan, profesional, dan pelayanan yang humanis.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Jumat (7/11/2025). Presiden melantik 10 anggota yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie. ■ PYB